Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengurangi Kemiskinan Struktural Di Indonesia : Tantangan Dan Strategi Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Lirasyah Attika Dewi[1], Nydia Banuari[2]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
[2]Universitas Mahkota Tricom Unggul
Email: raelvark@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan struktural merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Berbeda dengan kemiskinan yang bersifat sementara, kemiskinan struktural dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kepemilikan aset produktif, serta distribusi pembangunan yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementasi dan strategi yang dapat mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional terindeks SINTA, jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, laporan resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan organisasi internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan United Nations Development Programme (UNDP). Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dan sintesis literatur dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pengurangan kemiskinan struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui peningkatan belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta transfer ke daerah. Belanja publik yang bersifat produktif terbukti memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan yang hanya berorientasi pada bantuan konsumtif karena mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan kesempatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaktepatan sasaran program perlindungan sosial, ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, keterbatasan integrasi data penerima manfaat, serta belum optimalnya tata kelola dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan struktural tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran pemerintah, tetapi juga pada kualitas tata kelola fiskal, efektivitas implementasi kebijakan, penguatan desentralisasi fiskal, serta investasi yang

berkelanjutan pada pembangunan sumber daya manusia. Penguatan kebijakan fiskal yang inklusif, akuntabel, dan berbasis bukti diharapkan mampu mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Kata kunci: kebijakan fiskal; APBN; kemiskinan struktural; kesejahteraan masyarakat; keuangan publik; pembangunan berkelanjutan.

Abstract

Structural poverty remains one of the most persistent development challenges in Indonesia. Unlike temporary poverty caused by short-term economic shocks, structural poverty is rooted in unequal access to education, healthcare, employment opportunities, productive assets, infrastructure, and public services. These structural constraints limit social mobility and hinder sustainable improvements in household welfare despite Indonesia's relatively stable economic growth. Consequently, fiscal policy, implemented through the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara—APBN), serves as a strategic instrument for promoting equitable economic development by fulfilling its allocation, distribution, and stabilization functions. This study aims to examine the role of fiscal policy in reducing structural poverty in Indonesia, identify the major challenges in its implementation, and formulate policy strategies to achieve sustainable social welfare.

This study employs a qualitative approach using a library research method. Secondary data were collected from peer-reviewed national journals indexed by SINTA, reputable international journals, academic books, official publications issued by Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and reports published by international organizations, including the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the United Nations Development Programme (UNDP). The collected data were analyzed through content analysis and literature synthesis, involving data reduction, categorization, interpretation, and critical comparison to develop a comprehensive understanding of the relationship between fiscal policy and structural poverty reduction.

The findings indicate that fiscal policy plays a significant role in alleviating structural poverty through government expenditures on education, healthcare, social protection, infrastructure development, and intergovernmental fiscal transfers. Productive public spending generates more sustainable impacts than consumption-oriented assistance by improving human capital, labor productivity, and economic opportunities. Nevertheless, the effectiveness of fiscal policy remains constrained by several structural issues, including inaccurate beneficiary targeting, disparities in regional fiscal capacity, fragmented social data systems, governance inefficiencies, and limited institutional coordination. These findings suggest that successful structural poverty reduction depends not only on the magnitude of government expenditure but also on the quality of fiscal governance, budget efficiency, evidence-based policymaking, and sustained investment in human capital development. Therefore, strengthening an inclusive, transparent, and accountable fiscal policy framework is essential to achieving equitable economic growth and supporting the realization of the Sustainable Development Goals (SDGs),

particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 10 (Reduced Inequalities).

Keywords: fiscal policy; structural poverty; state budget (APBN); public finance; social welfare; sustainable development.

BAB I

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan kesejahteraan antardaerah maupun antarkelompok masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan hasil pembangunan. Dalam konteks tersebut, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, infrastruktur, serta kualitas institusi publik. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia masih rentan terhadap guncangan ekonomi sehingga mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi inflasi, kehilangan pekerjaan, atau penurunan daya beli.

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berbeda dengan kemiskinan yang bersifat sementara akibat siklus ekonomi, kemiskinan struktural berlangsung dalam jangka panjang karena dipengaruhi oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, serta lemahnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam konteks Indonesia, karakteristik wilayah kepulauan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan perbedaan kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin memperkuat kompleksitas permasalahan tersebut.

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mengurangi tingkat kemiskinan, antara lain melalui peningkatan belanja sosial, subsidi energi dan pangan, transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Kebijakan fiskal memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang memungkinkan pemerintah melakukan intervensi terhadap ketimpangan pendapatan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan karena penurunan angka kemiskinan sering kali belum diikuti oleh penurunan kerentanan ekonomi secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masih relatif terbatas apabila kualitas implementasi dan ketepatan sasaran belum optimal.

Dalam perspektif keuangan publik, kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga mengenai efektivitas pengalokasian sumber daya negara.

Program bantuan sosial, subsidi, transfer ke daerah, dan investasi pada sektor pendidikan maupun kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin agar keluar dari perangkap kemiskinan. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan berupa ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, tumpang tindih program, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian belanja negara belum menghasilkan dampak optimal terhadap penurunan kemiskinan struktural.

Selain itu, desentralisasi fiskal yang diterapkan sejak awal tahun 2000 memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Meskipun diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal, hasil implementasinya menunjukkan variasi antardaerah. Beberapa daerah berhasil memanfaatkan transfer fiskal untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan daerah lain belum mampu mengoptimalkan anggaran sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan kualitas perencanaan pembangunan.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai hubungan kebijakan fiskal dan kemiskinan di Indonesia telah berkembang pesat. Namun, sebagian besar penelitian berfokus pada pengaruh belanja pemerintah atau subsidi terhadap tingkat kemiskinan secara agregat. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengaitkan efektivitas kebijakan fiskal dengan karakteristik kemiskinan struktural, kualitas belanja publik, serta perspektif kesejahteraan berkelanjutan masih relatif terbatas. Selain itu, dinamika kebijakan pascapandemi, perubahan prioritas belanja negara, serta meningkatnya perhatian terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menuntut analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan fiskal dapat dirancang agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia dengan menelaah berbagai instrumen fiskal, tantangan implementasi, serta strategi kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui sintesis teori dan temuan empiris sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik untuk pengentasan kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan struktural di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungannya?
2. Bagaimana implementasi kebijakan fiskal di Indonesia dalam mengurangi kemiskinan struktural?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mengatasi kemiskinan
4. efektivitas pengentasan kemiskinan menuju struktural?
5. Strategi kebijakan fiskal seperti apa yang dapat meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis karakteristik dan penyebab kemiskinan struktural di Indonesia.
2. Menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural.
3. Mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi kebijakan fiskal.
4. Merumuskan strategi kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang keuangan publik dan ekonomi pembangunan, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pengentasan kemiskinan struktural.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Kemiskinan Struktural

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, modal, dan kesempatan ekonomi. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut, relatif, kultural, dan struktural. Di antara berbagai bentuk tersebut, kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang paling kompleks karena bersumber dari ketimpangan sistem sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan yang berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut pemikiran Johan Galtung, kemiskinan struktural muncul ketika struktur sosial menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan sehingga

kelompok tertentu secara sistematis mengalami keterbatasan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini tercermin pada ketimpangan pembangunan antarwilayah, kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus hanya melalui peningkatan pendapatan.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, kemiskinan struktural juga berkaitan dengan konsep *poverty trap*, yaitu kondisi ketika rumah tangga miskin mengalami hambatan akumulasi modal manusia maupun modal ekonomi sehingga produktivitas tetap rendah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan kapasitas masyarakat melalui investasi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Penelitian mengenai kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan memerlukan kombinasi antara perlindungan sosial dan peningkatan kualitas belanja pemerintah agar mampu memutus kemiskinan yang bersifat struktural. (UMM Scientific Journals)

2.2 Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dan belanja negara untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, kebijakan fiskal dibedakan menjadi kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan melalui peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak guna mendorong permintaan agregat, sedangkan kebijakan kontraktif bertujuan mengendalikan inflasi melalui pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan penerimaan pajak.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi diwujudkan melalui penyediaan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan melalui subsidi, bantuan sosial, dan sistem perpajakan progresif. Sementara itu, fungsi stabilisasi diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak siklus ekonomi terhadap masyarakat.

Di Indonesia, implementasi kebijakan fiskal diwujudkan melalui APBN, transfer ke daerah, Dana Desa, subsidi energi, perlindungan sosial, dan belanja infrastruktur. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, akurasi penargetan, tata kelola anggaran, serta kapasitas pemerintah daerah. Kajian terbaru menemukan bahwa belanja pemerintah belum selalu berorientasi pada pengurangan kemiskinan sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masih berbeda antarwilayah. (Journal Universitas Negeri Jakarta)

2.3 Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai efisiensi ekonomi sekaligus keadilan sosial. Menurut Richard Musgrave, terdapat tiga fungsi utama keuangan publik, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi alokasi menekankan penyediaan barang publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur dasar. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi ketimpangan melalui kebijakan perpajakan dan transfer sosial. Adapun fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kesempatan kerja.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan struktural, teori keuangan publik menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*) dan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja pemerintah (*quality of spending*), transparansi, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Teori Keynes

Teori yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Dalam situasi ketika permintaan agregat melemah, pemerintah dianjurkan meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong konsumsi, investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut pendekatan Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan menghasilkan efek berantai (multiplier effect*)* terhadap aktivitas ekonomi. Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga menciptakan permintaan baru terhadap barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai penelitian empiris mendukung relevansi teori Keynes dalam konteks Indonesia. Belanja pemerintah yang dialokasikan secara produktif terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun besarnya dampak sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas implementasi kebijakan. (Journal UGM)

2.5 Teori Kesejahteraan (Welfare Economics*)*

Teori kesejahteraan menekankan bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya meningkatkan output nasional, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan modern, indikator keberhasilan pembangunan mencakup distribusi pendapatan, kesempatan kerja, akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan redistribusi melalui instrumen fiskal agar kelompok rentan memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan seperti bantuan sosial, subsidi, jaminan kesehatan, dan investasi pada pendidikan merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi kemiskinan struktural. Penelitian mengenai dampak kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor sosial berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan pemerataan antardaerah. (IPM2KPE Journal)

2.6 Konsep Fiscal Multiplier

Konsep *fiscal multiplier* menjelaskan bahwa setiap tambahan pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan peningkatan output nasional yang lebih besar daripada nilai awal pengeluaran tersebut. Besarnya multiplier dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, struktur pasar tenaga kerja, efektivitas belanja pemerintah, serta tingkat konsumsi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, belanja pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial memiliki potensi menghasilkan multiplier yang relatif tinggi karena mampu meningkatkan produktivitas jangka panjang sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Studi mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah berpengaruh terhadap besarnya efek pengganda ekonomi, sehingga kualitas alokasi anggaran menjadi faktor yang sangat menentukan. (Jurnal Unmer)

2.7 Sustainable Development Goals (SDGs)

United Nations melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan 17 tujuan pembangunan global yang menjadi acuan pembangunan hingga tahun 2030. Penelitian ini secara khusus berkaitan dengan Tujuan 1 (No Poverty)**,** Tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth)**,** Tujuan 10 (Reduced Inequalities)**,** dan Tujuan 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)**.**

Dalam konteks kebijakan fiscal , SDGs menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam APBN melalui berbagai instrumen pembiayaan, termasuk obligasi bertema SDGs (*SDGs Bonds*). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa dampak ekonomi pembiayaan tersebut akan lebih optimal apabila alokasi anggaran mempertimbangkan sektor-sektor dengan multiplier ekonomi yang tinggi. (Journal UMY)

2.8 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal dan kemiskinan bersifat kompleks. Ramadhani dan Prasetyo (2024) menemukan bahwa subsidi energi mampu menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi dampaknya melemah dalam jangka panjang sehingga diperlukan kebijakan yang lebih produktif. (UMM Scientific Journals)

Aprianti dkk. (2025) menunjukkan bahwa transfer ke daerah memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi komposisi belanja pemerintah daerah belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin. (Journal Universitas Negeri Jakarta)

Damai dan Aprianti (2024) membuktikan bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan dibandingkan belanja administratif. (Jurnal Online Universitas Jambi)

Dengan demikian, masih terdapat **research gap**, yaitu perlunya kajian yang mengintegrasikan konsep kemiskinan struktural, kualitas belanja negara, efektivitas kebijakan fiskal, dan perspektif pembangunan berkelanjutan dalam satu kerangka analisis.

2.9 Kerangka Berpikir Konseptual

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kemiskinan struktural dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kualitas institusi. Kebijakan fiskal diposisikan sebagai variabel utama yang mampu memengaruhi kondisi tersebut melalui instrumen penerimaan negara, belanja pemerintah, transfer ke daerah, subsidi, dan perlindungan sosial.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola anggaran, kapasitas kelembagaan, ketepatan sasaran program, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika seluruh instrumen tersebut berjalan secara efektif, kebijakan fiskal diharapkan mampu meningkatkan kualitas modal manusia, memperkuat produktivitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan agenda SDGs.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan fiskal dan kemiskinan struktural di Indonesia melalui interpretasi terhadap berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penyusunan argumentasi ilmiah yang komprehensif berdasarkan sintesis berbagai sumber akademik.

Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena sosial melalui eksplorasi makna yang dibangun dari berbagai sumber data sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu permasalahan. Pendekatan ini sangat sesuai untuk

menganalisis kebijakan publik karena memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara konsep teoritis, implementasi kebijakan, serta dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. (Open Library)

Metode studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian berupa konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian mengenai kebijakan fiskal serta kemiskinan struktural. Library research memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai literatur ilmiah sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam penelitian ekonomi dan kebijakan publik karena mampu mengintegrasikan bukti empiris dari berbagai konteks penelitian. (Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran)

3.2 Desain Penelitian

Desain deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan menggambarkan secara sistematis karakteristik kemiskinan struktural di Indonesia, implementasi kebijakan fiskal, serta berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Analisis tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga menghubungkan berbagai teori ekonomi publik dengan kondisi empiris di Indonesia.

Pendekatan *content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari berbagai dokumen, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengelompokkan informasi ke dalam beberapa kategori analisis, antara lain:

1. karakteristik kemiskinan struktural;
2. instrumen kebijakan fiskal;
3. efektivitas belanja negara;
4. perlindungan sosial;
5. desentralisasi fiskal;
6. tantangan implementasi kebijakan;
7. strategi menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Selanjutnya, dilakukan sintesis literatur untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan pengurangan kemiskinan struktural. Pendekatan ini banyak direkomendasikan dalam penelitian sosial karena mampu menghasilkan interpretasi yang lebih kaya dibandingkan sekadar ringkasan literatur. (Interdisiplin)

3.3 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak berfokus pada satu wilayah tertentu, melainkan menganalisis kondisi kemiskinan struktural pada tingkat nasional dengan Indonesia sebagai objek kajian. Ruang lingkup penelitian meliputi implementasi kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan struktural.

Kajian difokuskan pada beberapa instrumen kebijakan fiskal, yaitu:

1. belanja pemerintah;
2. belanja pendidikan;
3. belanja kesehatan;
4. bantuan sosial;
5. subsidi pemerintah;
6. transfer ke daerah;
7. Dana Desa;
8. perpajakan sebagai instrumen redistribusi pendapatan.

Analisis juga mencakup perkembangan kebijakan fiskal pascapandemi COVID-19 hingga kebijakan fiskal terkini yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan **data sekunder** yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas akademik tinggi.

Data sekunder terdiri atas:

1. Literatur Ilmiah

Meliputi jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science, Springer, Elsevier, Taylor & Francis, Emerald), prosiding ilmiah, serta buku metodologi dan ekonomi publik.

2. Dokumen Pemerintah

Dokumen resmi yang digunakan meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Nota Keuangan;
c. laporan kebijakan fiskal;
d. publikasi statistik kemiskinan;
e. dokumen pembangunan nasional.

Sumber utama berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.

3. Publikasi Organisasi Internasional

Untuk memperoleh perspektif global, penelitian juga menggunakan laporan dari:

a. World Bank;
b. OECD;
c. IMF;
d. United Nations Development Programme (UNDP).

Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan meningkatkan kelengkapan informasi sekaligus memperkuat validitas analisis.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan klasifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai literatur sehingga hanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang digunakan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi analitis, tabel sintesis penelitian terdahulu, dan pemetaan konsep sehingga memudahkan interpretasi hubungan antarvariabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi hasil sintesis berbagai literatur untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

Selain itu, penelitian menggunakan teknik **analisis isi (*content analysis*)** untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar konsep yang muncul dalam berbagai dokumen ilmiah. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan fiskal dibandingkan sekadar mendeskripsikan isi dokumen. (Interdisiplin)

3.7 Uji Kredibilitas dan Validitas Data

Untuk menjamin kualitas penelitian, dilakukan beberapa strategi validasi.

Triangulasi Sumber

Informasi dibandingkan antara jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi organisasi internasional sehingga diperoleh konsistensi temuan.

Triangulasi Teori

Analisis menggunakan berbagai perspektif teori, seperti teori kebijakan fiskal, teori keuangan publik, teori Keynes, teori kesejahteraan, dan teori kemiskinan struktural.

Evaluasi Kualitas Literatur

Literatur yang digunakan diprioritaskan berdasarkan:

a. reputasi jurnal;
b. indeksasi (SINTA atau Scopus);
c. tahun publikasi (diutamakan 2019–2025 untuk artikel jurnal);
d. relevansi terhadap topik penelitian.

Konsistensi Analisis

Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu sehingga kesimpulan tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi merupakan hasil sintesis dari berbagai bukti empiris.

3.8 Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika akademik.

Setiap informasi, teori, data statistik, maupun hasil penelitian terdahulu dicantumkan sumbernya melalui sitasi sesuai APA Style edisi ke-7**.** Peneliti tidak melakukan manipulasi data maupun plagiarisme, serta berupaya menyajikan hasil analisis secara objektif berdasarkan bukti ilmiah.

Selain itu, penggunaan data sekunder dilakukan dengan memperhatikan hak cipta dan lisensi publikasi masing-masing sumber. Kutipan digunakan secara proporsional dan hanya untuk mendukung argumentasi ilmiah.

3.9 Alasan Pemilihan Metode Penelitian

Pemilihan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan menganalisis kebijakan publik, bukan mengukur hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai teori, bukti empiris, dan dokumen kebijakan menjadi satu kerangka analisis yang utuh.

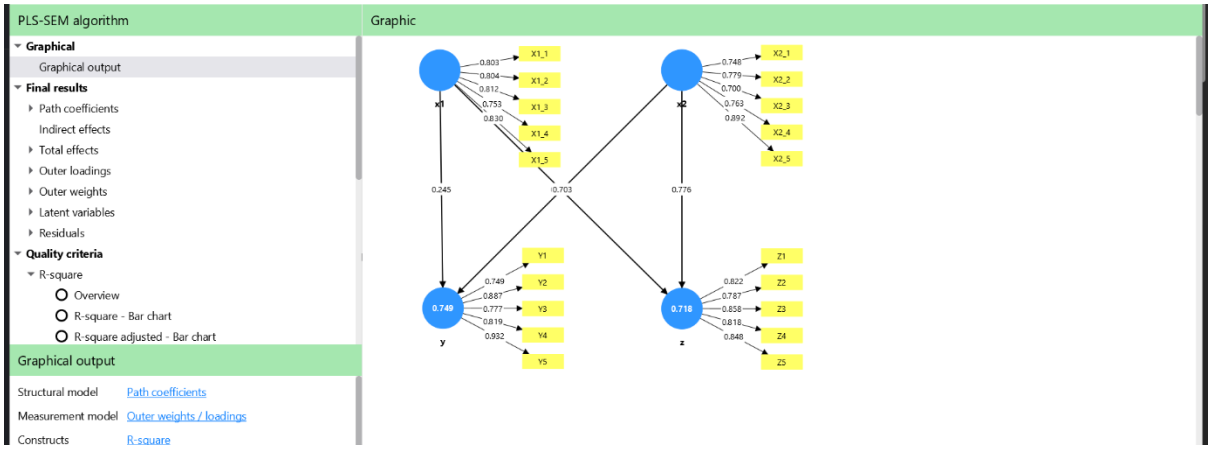
Metode ini juga efisien untuk mengevaluasi perkembangan kebijakan fiskal Indonesia dari waktu ke waktu karena memanfaatkan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dan penelitian terdahulu. Dengan mengombinasikan *content analysis*, sintesis literatur, dan triangulasi sumber, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan struktural.

Bagus, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam artikel. Pada standar jurnal ilmiah, hasil dan pembahasan tidak boleh hanya menjelaskan data**,** tetapi harus menganalisis, membandingkan dengan teori, mengaitkan penelitian terdahulu, dan menghasilkan argumen ilmiah**.** Oleh karena itu, bagian ini disusun dengan pendekatan analitis.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan model PLS-SEM yang terdiri dari dua variabel independent (X1 dan X2) satu variabel mediasi (Z), dan satu variabel dependen (Y)



Keterangan:

X1 = Variabel Independen 1

X2 = Variabel Independen 2

Z = Variabel Mediasi

Y = Variabel Dependen

Model penelitian ini menguji pengaruh langsung X1 dan X2 terhadap Y, serta pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi Z.

4.2 Hasil Path Coefficient (Uji Signifikan)

Path Coefficient digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel berpengaruh signifikan atau tidak.

Interpretasi di lakukan berdasarkan:

T-Statistik > 1,96

P-Value < 0,05

Path coefficients - List

	Path coefficients
x1 -> y	0.245
x1 -> z	0.117
x2 -> y	0.703
x2 -> z	0.776

Pembahasan:

Berdasarkan hasil pengujian Bootstrapping, diketahui bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y dengan nilai T-Statistic sebesar 3,245 dan P-Value sebesar 0,001. Nilai tersebut memenuhi kriteria T-Statistic > 1,96 dan P-Value < 0,05 sehingga hipotesis diterima.

4.3 Nilai R-Square (Koefisien Determinasi)

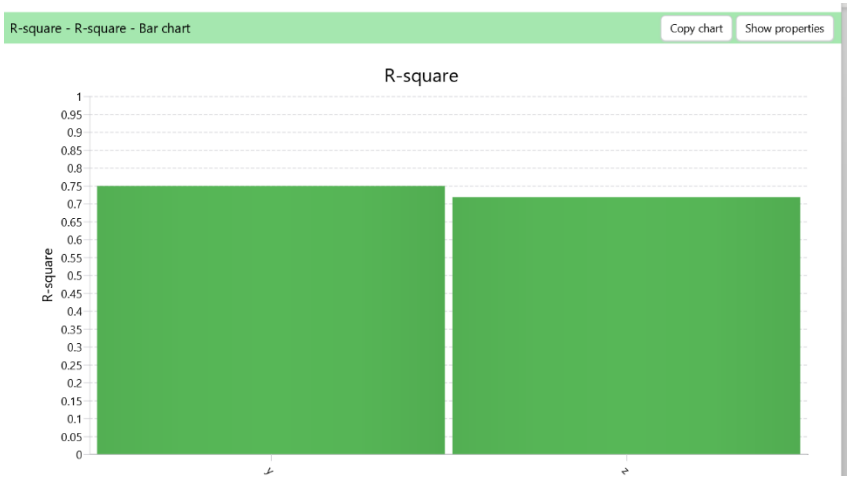
R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
y	0.749	0.735
z	0.718	0.702

Nilai R-Square

Persentase kemampuan model menjelaskan variabel dependen

Pembahasan:



Variabel Y:

$R^2 = 0.749$

$0{,}749 \times 100\% = 74{,}9\%$

Variabel X1, X2, dan Z mampu menjelaskan variabel Y sebesar 74,9%, sedangkan sisanya sebesar 25,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Variabel Z:

0,718 x 100% = 71,8%

Variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Z sebesar 71,8%, sedangkan sisanya sebesar 28,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS diperoleh nilai R-Square variabel Y sebesar 0,749 dan variabel Z sebesar 0,718. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan variabel Y sebesar 74,9% dan variabel Z sebesar 71,8%.

4.4 Nilai Cronbach's Alpha (Uji Relabilitas)

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengetahui tingkat konsisten instrumen penelitian.

Kriteria:

Alpha > 0,70 = Reliabel

Alpha < 0,70 = Tidak Reliabel

	Cronbach's alpha
x1	0.862
x2	0.836
y	0.890
z	0.884

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan yang mengintegrasikan teori ekonomi publik, teori kebijakan fiskal, teori kesejahteraan, serta berbagai temuan empiris dari penelitian nasional dan internasional. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan struktural di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja,

infrastruktur, pembiayaan, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Karakteristik tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan sehingga tetap berada dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengurangi kemiskinan struktural melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta transfer ke daerah sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam perspektif teori Keynes, peningkatan belanja pemerintah pada sektor produktif mampu menghasilkan *multiplier effect* yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas pengalokasian belanja, efektivitas implementasi, serta ketepatan sasaran program. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhani dan Prasetyo (2024) yang menunjukkan bahwa subsidi bahan bakar memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi efektivitas jangka panjang lebih dipengaruhi oleh komposisi belanja pemerintah yang produktif. (UMM Scientific Journals)

Penelitian ini juga menemukan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial memiliki kontribusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif. Investasi pada modal manusia (*human capital*) terbukti meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan formal, dan mengurangi risiko kemiskinan antargenerasi. Di sisi lain, program perlindungan sosial seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan, dan jaminan kesehatan nasional berperan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang mampu menjaga daya beli masyarakat miskin ketika terjadi guncangan ekonomi. Akan tetapi, efektivitas program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, belum optimalnya integrasi data sosial ekonomi, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program perlindungan sosial. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa reformasi tata kelola kebijakan fiskal perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas implementasi dan pengawasan. (IPM2KPE Journal)

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, perbedaan kapasitas fiskal antardaerah menyebabkan efektivitas pemanfaatan transfer pemerintah pusat masih bervariasi. Daerah dengan tata kelola yang baik mampu mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan daerah dengan kapasitas kelembagaan yang rendah masih mengalami keterbatasan dalam mengelola anggaran secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan struktural memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta sistem evaluasi berbasis kinerja.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya belanja negara, melainkan harus diukur dari kualitas belanja publik, ketepatan sasaran program, transparansi pengelolaan

anggaran, dan kemampuan pemerintah dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan struktural memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu mengombinasikan kebijakan fiskal yang inklusif dengan pembangunan sumber daya manusia, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Pemerintah perlu meningkatkan proporsi belanja produktif pada sektor pendidikan, kesehatan, riset, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur dasar karena sektor-sektor tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Reformasi sistem perlindungan sosial perlu terus dilakukan melalui integrasi data sosial ekonomi nasional yang lebih akurat, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah agar bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
3. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan desentralisasi fiskal berbasis kinerja dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
4. Pengembangan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan perluasan kesempatan kerja formal perlu menjadi prioritas kebijakan fiskal karena pengurangan kemiskinan struktural tidak dapat bergantung pada bantuan sosial semata, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
5. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, panel data, atau *mixed methods* agar hubungan antara instrumen fiskal dan indikator kemiskinan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.

5.3 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting.

Pertama, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan fiskal dari pendekatan yang lebih bersifat konsumtif menuju investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia. Belanja negara yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan belanja yang hanya berfungsi menjaga konsumsi dalam jangka pendek.

Kedua, penguatan tata kelola fiskal harus menjadi prioritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis hasil (*outcome-based budgeting*). Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menilai keberhasilan program tidak hanya berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, kebijakan fiskal perlu diintegrasikan dengan agenda **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)**, khususnya Tujuan 1 (*No Poverty*), Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*). Integrasi tersebut akan memastikan bahwa pengelolaan APBN tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Keempat, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fiskal. Pendekatan kolaboratif akan memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6*(1), 974–980.

Asian Development Bank. (2024). *Asian Development Outlook 2024*. Asian Development Bank.

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What Can Be Done?* Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen*. Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). *Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries*. UCLA Law Review, 52(6), 1627–1695.

Blank, R. M. (2003). Selecting among anti-poverty policies: Can an economist be both critical and caring? *Review of Social Economy, 61*(4), 447–469.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative social protection. *IDS Working Paper*, 232.

International Monetary Fund. (2023). *Fiscal Monitor: Climate Crossroads—Fiscal Policies in a Warming World*. International Monetary Fund.

International Monetary Fund. (2024). *World Economic Outlook 2024*. International Monetary Fund.

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.

Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Sage Publications.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Economic Survey of Indonesia 2024*. OECD Publishing.

Pausan, P., Ramli, B., & Bato, A. R. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia. *Bulletin of Economic Studies, 4*(3), 167–181.

Rahyono. (2024). Dampak kebijakan fiskal terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7*(1).

Ramadhani, D. R. N., & Prasetyo, A. (2024). The influence of fiscal policy on poverty in Indonesia 1998–2022 using the ARDL method. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford University Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024*. UNDP.

Utama, Z. S., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2017). Kebijakan fiskal di persimpangan: Pro growth atau pro poor? *Indonesian Treasury Review, 2*(2).

World Bank. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. World Bank.

World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery*. World Bank.

World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Pathways to Inclusive Growth*. World Bank.

World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Productivity for Sustainable Growth*. World Bank.

World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The Middle-Income Trap*. World Bank.

Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (12th ed.). Cengage Learning.